

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Analisis Dampak Implementasi Pembangunan Bandara Kertajati Terhadap Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat

Wikarta¹Danny Permana²Yovinus³**Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani***Email Korespondensi : wikartasip@gmail.com*

Abstrak

Implementasi kebijakan pembangunan Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka berpengaruh baik secara sosial, ekonomi, serta karakteristik pertanian yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan mengingat luasnya Kawasan bandara Kertajati tersebut. Dari sekian banyak Kawasan yang terdampak pembangunan Bandara Kertajati, Kecamatan Jatitujuh menjadi lokus penelitian mengingat wilayah ini sangat dekat dengan Kawasan bandara, sehingga banyak dampak yang ditimbulkan misalnya kebisingan akibat aktivitas penerbangan, beberapa desa di Kawasan bandara yang berstatus sebagai zona hijau Kawasan pertanian, serta potensi terjadinya perubahan social akibat perkembangan Kawasan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Dampak Sosial, Ekonomi Dan Politis Dalam pembangunan BIJB Kertajati dari sisi konten kebijakan masih membutuhkan beberapa perbaikan dan masukan, terutama sebagai akibat dari pelaksanaannya yang bertahap dan tidak sekaligus atau tidak sesuai dengan yang direncanakan akibat dari komitmen yang rendah dari semua pihak, serta belum terperhatikannya persepsi dan ekspektasi yang terjadi di masyarakat setempat. Sedangkan dari sisi konteks pelaksanaan, dipengaruhi juga oleh sejauhmana strategi yang dilaksanakan serta sinergitas lembaga dan program yang masih rendah dalam menyikapi permasalahan pembebasan lahan yang semakin kompleks.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik studi dokumentatif. Adapun metode penelitian kualitatif yang dimaksud yaitu Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah terkait Dampak Implementasi Kebijakan Pembangunan Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Pembangunan Bandara Kertajati, BIJB

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Abstract

The implementation of the Kertajati Airport development policy in Majalengka Regency has an impact both socially, economically, and on agricultural characteristics caused by land conversion considering the vastness of the Kertajati Airport area. Of the many areas affected by the construction of Kertajati Airport, Jatitujuh District is the research locus considering that this area is very close to the airport area, so that many impacts are caused, for example noise due to flight activities, several villages in the airport area that have the status of a green zone for agricultural areas, and the potential for social change due to the development of the area.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the Social, Economic and Political Impacts in the development of BIJB Kertajati from the policy content side still require some improvements and input, especially as a result of its gradual implementation and not all at once or not in accordance with what was planned due to low commitment from all parties, and the perceptions and expectations that occur in the local community have not been considered. Meanwhile, from the context of implementation, it is also influenced by the extent of the strategy implemented and the synergy of institutions and programs that are still low in responding to increasingly complex land acquisition problems.

The research method used in this study is Qualitative with a descriptive approach through documentary study techniques. The qualitative research method in question is the research method used to examine the natural object conditions related to the Impact of the Implementation of the Kertajati Airport Development Policy in Majalengka Regency, where the researcher is the key instrument, data collection techniques are carried out by triangulation (combination), data analysis is inductive, and the results of qualitative research emphasize meaning rather than generalization.

Keywords: *Policy implementation, Kertajati Airport Development, BIJB*

PENDAHULUAN

Kabupaten Majalengka memiliki kecamatan dengan perkembangan kawasan cukup beragam salah satu contohnya adalah daerah yang terdampak pembangunan bandara internasional Jawa Barat atau lebih dikenal dengan nama Bandara Kertajati. Meskipun dalam banyak hal ada banyak sisi positif bagi perkembangan dan kemajuan wilayah Jawa Barat khususnya Kabupaten Majalengka, namun tentu ada dampak negatif atau eksekusi dari pembangunan tersebut terhadap masyarakat yang ada di sekitar Kawasan pembangunan bandara tersebut.

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Implementasi kebijakan pembangunan Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka berpengaruh baik secara sosial, ekonomi, serta karakteristik pertanian yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan mengingat luasnya Kawasan bandara Kertajati tersebut. Dari sekian banyak Kawasan yang terdampak pembangunan Bandara Kertajati, Kecamatan Jatitujuh menjadi lokus penelitian mengingat wilayah ini sangat dekat dengan Kawasan bandara, sehingga banyak dampak yang ditimbulkan misalnya kebisingan akibat aktivitas penerbangan, beberapa desa di Kawasan bandara yang berstatus sebagai zona hijau Kawasan pertanian, serta potensi terjadinya perubahan social akibat perkembangan Kawasan.

Hingga saat ini Kawasan di sekitar Bandara Kertajati masih memiliki perkembangan kawasan yang cenderung lambat dengan area tumbuh hanya pada perkotaan saja. Perkembangan kota kecamatan ini berada di sepanjang jalan raya utama Jatitujuh. Struktur Kota ini mempunyai beberapa pusat kegiatan yang sudah berkembang maupun yang akan dikembangkan. Masing-masing pusat kegiatan utama tersebut memiliki karakteristik pemanfaatan ruang yang berbeda. Bentuk struktur *Nucklei* ini didasarkan pada keberadaan pertumbuhan beberapa aktivitas dengan lokasi yang berbeda-beda dan masing-masing memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap wilayah sekelilingnya.

Pengembangan Kecamatan Jatitujuh akan mempengaruhi pengembangan wilayah lain yang berbatasan, antara lain Kabupaten Indramayu. Hal ini dikarenakan adanya perubahan tata guna lahan dapat berimplikasi pada perubahan baik secara sektoral maupun keseluruhan. Hal ini didasarkan pada keberadaan Kecamatan Jatitujuh sebagai *hinterland* Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Selain itu menurut Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka, kecamatan ini merupakan bagian dari Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Internasional Jawa Barat. Kondisi ini dapat dilihat dari struktur ruang Kecamatan Jatitujuh agar tidak berdampak pada konflik kepentingan yang beragam. (Shidik Surachman : 2012).

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati berada di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka dengan jarak sekitar 68 km dari Kota Bandung, Ibukota Provinsi Jawa Barat. Bandara ini diresmikan pada bulan Mei 2018, dan mulai beroperasi

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

pada tanggal 8 Juni 2018. Bandar Udara Kertajati ini merupakan bandar udara terbesar kedua di Indonesia setelah Soekarno-Hatta.

Luas lahan BIJB tercatat sebesar 1.800 hektar dan pembangunannya dibagi ke dalam tiga tahap. Saat ini pembangunan baru terselesaikan ditahap 1A dengan luas terminal 96.200 meter persegi. Adapun ultimate terminal bandara yang mengusung konsep burung merak mencapai 209.500 meter persegi. Bandara Kertajati kini baru memiliki satu landasan pacu atau runway sepanjang 2.500 meter. Runway ini akan bertambah menjadi 3.500 meter agar bisa didarati pesawat berbadan lebar dan pada tahap akhir bandara ini akan memiliki dua landasan pacu (Jimika, 2019).

Pengembangan bandar udara internasional dan *Aerocity* di Kertajati ini tercantum dalam Peraturan Daerah No.22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Gubernur Jawa Barat, 2010). Kemudian rencana pengembangan tersebut masuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No.11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Bupati Majalengka, 2011). Sebagai bandara yang didesain untuk menjadi pemecah kepadatan di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng dan Bandara Husein Sastranegara Bandung, pada awal Oktober 2018 dibuka layanan penerbangan internasional oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sudah selayaknya pembangunan Bandara Kertajati ini memberikan dampak yang positif bagi perekonomian di Jawa Barat khususnya Kabupaten Majalengka.

Rencana pembangunan kawasan *Aerocity* diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat setempat, meningkatkan tingkat kesejahteraan, menciptakan iklim bisnis lokal, dan menghasilkan lapangan kerja bagi masyarakat. Adapun dari sisi pemerintahan juga diharapkan mampu merangsang ekonomi lokal, memperkuat pengembangan industri, bisnis dan sektor pariwisata, mendorong budidaya sumber daya alam untuk mendukung nilai tambah industri, penghasilan pajak, dan lainnya. Investor akan mendapatkan akses pasar global, keamanan dan keselamatan, pengurangan biaya untuk menjadi lebih kompetitif di pasar, dan menjadi bisnis produksi untuk meringankan

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

pintu masuk menuju Pasar ASEAN.

Dalam suatu pembangunan pasti ada suatu dampak yang dihasilkan, dan dampak tersebut juga dapat berdampak ganda. Baik dampak positif maupun dampak negatif yang akan dialami oleh suatu masyarakat, dampak itu berupa dampak sosial, dampak ekonomi, maupun dampak lingkungan. Semua dampak tersebut akan berimbas pada perubahan-perubahan terjadi di masyarakat. (Bagus Tsany Fadillah Rochman dkk : 2021).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik studi dokumentatif. Adapun metode penelitian kualitatif yang dimaksud yaitu Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah terkait Dampak Implementasi Kebijakan Pembangunan Bandara Kertajadi di Kabupaten Majalengka, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Karakteristik penelitian kualitatif yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci;
2. Peneliti kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka;
3. kualitatif menekankan pada proses dari pada produk atau *outcome*;
4. Peneliti kualitatif melakukan analisis data secara induktif;
5. Peneliti kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

Metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan menganalisis penelitian tentang Dampak dari Implementasi Kebijakan Pembangunan Bandara Kertajati di

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Kabupaten Majalengka yang merupakan kondisi objek yang alamiah, maka dari itu harus dilakukan pengkajian serta penelusuran secara teliti dan lebih mendalam dan bukan menarik secara umum atas hasil yang didapatkan.

KERANGKA TEORI

Implementasi Kebijakan Pembangunan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan- kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu: 1) Teori George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Proses Pembuatan Kebijakan

Proses kebijakan publik merupakan proses yg amat rumit dan kompleks. Oleh karenanya untuk mengkajinya para ahli kemudian membagi proses kebijakan publik ke dalam beberapa tahapan. Tujuannya untuk mempermudah pemahaman terhadap proses tersebut (Charles Lindblom, 1986: 3).

Anderson dalam Islamy (1994: 19) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Friedrich dalam Wahab (1991:13) mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang- peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Selain itu, Anderson dalam Lembaga Administrasi Negara (2000:2) mengartikan kebijakan publik sebagai suatu respons dari sistem politik terhadap demands/claims dan supports yang mengalir dari lingkungannya (Subarsono, 2006: 2) Berdasarkan pengertian ini,

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Dye (1978:9) mengemukakan dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen, yaitu (a) kebijakan publik, (b) pelaku kebijakan, dan (c) lingkungan kebijakan. Dunn juga mengemukakan bahwa dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen, yaitu (a) stakeholders kebijakan, (b) kebijakan publik (policy contents), dan (c) lingkungan kebijakan (policy environment).

Atas dasar pengertian tersebut dapat ditemukan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Anderson dalam Islamy (Subarsono (2006: 14) menyebutkan yang antara lain mencakup beberapa hal berikut.

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang dimaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Teori Dampak

Dampak menurut JE. Hosio (2007:57), adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dampak merupakan suatu perubahan yang nyata akibat dari keluarnya kebijakan terhadap sikap dan tingkah laku.

Dampak adalah pengaruh kuat yang dapat berakibat positif atau negatif. Sedangkan menurut para ahli, definisi dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negative atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kata dampak merupakan kata yang telah lazim digunakan dalam masyarakat luas pada

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

umumnya dibagi menjadi dampak positif dan dampak negative, (Peter Salim & Yeni Salim : 1991).

Menurut Gorys Kerap dalam Otto Soemarwoto (1998:35), dampak adalah sebuah pengaruh yang kuat dari seseorang atau sebuah kelompok orang dalam melakukan tugas dalam kedudukannya. pengaruh yang besar dan kuat ini nantinya akan membawa perubahan, baik itu perubahan kearah yang positif ataupun kearah yang negatif.

a. Dampak Positif

Dampak positif adalah sebuah perubahan yang terjadi pada posisi yang positif atau baik dari sebuah tindakan. Dampak ini bisa disebut sebagai dampak yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang masuk dalam sebuah lingkaran perubahan.

b. Dampak Negatif

Dampak negatif adalah sebuah pengaruh yang dihasilkan dari sebuah tindakan, pengaruh ini mengarah pada kondisi negatif atau bisa di sebut dengan pengaruh yang merugikan atau memperburuk keadaan.

Menurut Otto Soemarwoto (1998:43) dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah baik kimia, fisik maupun biologi dan aktifitas dapat pula dilakukan oleh manusia. Adapun aspek-aspek dampak berdasarkan jenisnya yaitu sebagai berikut: a. Dampak yang disadari Dampak yang disadari bisa juga disebut sebagai dampak yang diharapkan. Dampak yang diharapkan ini merupakan dampak yang sebelum kemunculannya sudah bisa diprediksikan. b. Dampak yang tidak disadari Dampak yang tidak disadari adalah dampak yang benar-benar tidak disadari dan tidak diketahui akan muncul.

PEMBAHASAN

Proses dan Implementasi Kebijakan Pemerintah terkait Pembangunan Bandara Kertajati

Salah satu program pembangunan infrastruktur yang telah dicanangkan oleh

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah mengembangkan Kawasan Kertajati menjadi kawasan bandar udara dan aerocity. Untuk itu, maka dari segi perencanaan telah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat 2009-2029 dan RTRW Kabupaten Majalengka 2003- 2013, pengembangan kawasan Kertajati Aerocity telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dengan bandar udara sebagai infrastruktur strategis yang terdapat di dalamnya.

Sejalan dengan hal itu, secara Nasional telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional yang menempatkan BIJB Kertajati sebagai Bandar Udara Sekunder di Indonesia. Dari beberapa kebijakan tersebut, maka pembangunan BIJB di Kertajati sangatlah prioritas untuk menunjang pembangunan ekonomi regional maupun nasional. Tentunya pembangunan ini sangat tergantung pada peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, meliputi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Majalengka, sektor swasta dan masyarakat di sekitar lokasi kawasan dan juga masyarakat Jawa Barat secara umum. Dalam rangka menunjang program tersebut telah direncanakan pula pembangunan Jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi-SumedangDawuan) dan Jalan Tol Cikapali (CikampekPalimanan), serta pembangunan jalur kereta api Bandung-Cirebon. Dengan adanya jalan tol tersebut, maka akses dari dan ke Bandar Udara Internasional Jawa Barat menjadi lebih mudah, baik untuk wilayah Bandung sekitarnya maupun wilayah lainnya (Santosa 2010).

Target pembebasan lahan untuk bandar udara ini adalah seluas 1.800 hektar yang akan dilakukan secara bertahap. Pada kenyataannya pembangunan berbagai infrastruktur ternyata jauh lebih sulit dari yang diharapkan dan direncanakan. Di antara kesulitan adalah pengadaan lahan/tanah, sebagai faktor yang menentukan terbangunnya suatu infrastruktur. Pengadaan tanah merupakan kebijakan pemerintah yang sangat krusial dan sangat menentukan terlaksananya suatu pembangunan infrastruktur. Dalam pengadaan tanah ini pemerintah seringkali tidak dapat menyelesaikan secara maksimal dikarenakan proses negosiasi dan

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

penerimaan masyarakat, tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Sampai dengan akhir tahun 2016 atau Tahap I, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berhasil melaksanakan kegiatan pembebasan lahan seluas 530 hektar. Lokasi pembebasan lahan ini terletak di tiga desa, yaitu Desa Kertajati, Desa Bantarjati dan Desa Kertasari dan diprioritaskan bagi pembangunan sisi udara (Runway I), serta sebagian kecil sisi darat. Namun dalam pelaksanaannya, proses pembebasan lahan bagi pembangunan BIJB belum sesuai dengan target yang diharapkan, baik dari sisi waktu dan luasan perolehan lahan serta masih adanya desa yang menolak untuk dibebaskan, yaitu Desa Sukamulya.

Kondisi dan situasi ini mempengaruhi pelaksanaan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat. Selain itu implementasi kebijakan pembebasan lahan yang tidak dilakukan secara sekaligus menimbulkan permasalahan tersendiri, menyangkut kesesuaian harga dan derajat penerimaan masyarakat terhadap keberlanjutan program pembangunan. Dalam rangka mendukung tahapan pembebasan lahan, maka tidak hanya peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetapi juga Pemerintah Kabupaten Majalengka, khususnya Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Hal ini terutama dalam tahap sosialisasi, pengukuran dan pendataan, maupun musyawarah untuk kesepakatan pembayaran harga tanah. Demikian pula halnya dengan peran masyarakat, terutama masyarakat yang bermukim di Kawasan Kertajati dan sekitarnya, karena mereka merupakan target group pembangunan tidak hanya dari sisi pemilik lahan, tetapi juga dari sisi keterlibatan mereka dalam pembangunannya.

Pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) akan memicu timbulnya perubahan yang sangat besar bagi masyarakat. Oleh karena itu dalam implementasi kebijakan pembebasan lahan perlu juga disertai dengan fasilitasi keinginan masyarakat baik dalam hal relokasi maupun pemberdayaannya, sehingga dapat diperoleh dukungan masyarakat dan manfaat dari kebijakan tersebut.

Upaya mewujudkan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati sangat strategis. Hal ini tidak hanya untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur bandar udara yang ada untuk melayani penumpang dan barang, tetapi juga dalam rangka meningkatkan keselamatan dan kelancaran transportasi udara serta untuk memajukan

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Prinsip dasar pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka adalah dapat menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan, mempertimbangkan kemudahan pencapaian bagi pengguna, dapat dikembangkan untuk memenuhi peningkatan permintaan jasa angkutan udara, menjamin pengoperasian dalam jangka panjang dan berwawasan lingkungan serta terjangkau secara ekonomis bagi pengguna dan penyelenggara bandara.

Kebijakan Pembangunan Bandara Internasional Kertajati (BIJB)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), sesuai dengan perencanaan nasional yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014 menyebutkan terbangunnya Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 34 Tahun 2005 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.

- a) Pasal 1, Ayat (1): Lokasi bandar udara di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, dengan Koordinat Geografis 06° 39' 27,89" Lintang Selatan dan 108° 10' 27,44".
- b) Pasal 2, Ayat (1): Luas rencana kebutuhan lahan untuk pembangunan bandar udara di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 seluas ± 1800 Hektar (Ha), yang selanjutnya akan ditentukan lebih rinci berdasarkan rencana induk bandar udara di Kabupaten Majalengka.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang pembangunan dan pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity Pasal 3 maksud dan tujuan pembangunan BIJB dan Aerocity adalah:

- a. Mendorong pengembangan wilayah pembangunan Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan);

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

- b. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi regional berbasis potensi daerah;
- c. Meningkatkan daya saing global Jawa Barat dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan investasi;
- d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi udara; dan
- e. Meningkatkan investasi, industri, perdagangan, pariwisata, pemukiman, dan perluasan lapangan kerja.

Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pada Kebijakan Pembangunan Bandara Internasional Kertajati terhadap Wilayah di Sekitarnya

Kebijakan pemindahan Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Internasional Kertajati melibatkan banyak aspek sosial ekonomi. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam analisis ini termasuk dampak terhadap perekonomian lokal, peningkatan lapangan pekerjaan, perubahan pola transportasi, serta reaksi masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Pemindahan bandara dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah sekitar Bandara Internasional Kertajati. Penambahan fasilitas bandara dan aktivitas penerbangan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kegiatan bisnis di sekitarnya. Namun, perubahan ini juga dapat menimbulkan dampak sosial, seperti perubahan gaya hidup dan struktur sosial di masyarakat setempat. Selain itu, perubahan dalam pola transportasi dan aksesibilitas juga merupakan aspek penting dalam analisis sosial ekonomi. Pemindahan bandara dapat mengubah cara orang mengakses dan menggunakan transportasi, dengan potensi meningkatkan konektivitas regional namun juga dapat menimbulkan tantangan baru terkait mobilitas masyarakat.

Reaksi masyarakat terhadap kebijakan ini juga harus diperhitungkan. Keterlibatan dan pemahaman masyarakat terkait manfaat dan dampak negatif yang mungkin timbul dari pemindahan bandara dapat memengaruhi tingkat dukungan terhadap kebijakan tersebut. Analisis sosial ekonomi pada pemindahan Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Internasional Kertajati akan membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

masyarakat dan ekonomi setempat.

Dampak Sosial, Ekonomi Dan Politis Dalam pembangunan BIJB Kertajati dari sisi konten kebijakan masih membutuhkan beberapa perbaikan dan masukan, terutama sebagai akibat dari pelaksanaannya yang bertahap dan tidak sekaligus atau tidak sesuai dengan yang direncanakan akibat dari komitmen yang rendah dari semua pihak, serta belum terperhatikannya persepsi dan ekspektasi yang terjadi di masyarakat setempat. Sedangkan dari sisi konteks pelaksanaan, dipengaruhi juga oleh sejauhmana strategi yang dilaksanakan serta sinergitas lembaga dan program yang masih rendah dalam menyikapi permasalahan pembebasan lahan yang semakin kompleks. Sehubungan dengan itu teori implementasi kebijakan dari Grindle (1980:10) dapat dipandang sesuai untuk digunakan dalam menjelaskan Dampak Sosial, Ekonomi Dan Politis Dalam pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati. Meskipun demikian hasil penelitian ini memperkuat teori dari Grindle, dengan beberapa temuan sebagai berikut:

- 1) *Content of policy* (konten kebijakan) terdapat beberapa penguatan yang perlu dilakukan, berkaitan dengan pentingnya penegasan komitmen semua pihak (kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi dan pelaksana program) sejak awal dalam merumuskan dan menyepakati sumber daya yang digunakan untuk menuntaskan dan memperlancar kebijakan pembebasan lahan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Selain itu penting juga diperhatikan persepsi dan ekspektasi masyarakat setempat dari kebijakan pembebasan lahan yang akan dilaksanakan (tipe manfaat dan derajat perubahan yang diinginkan) agar mendapat kesepahaman dan pada akhirnya penerimaan yang mendukung keberlanjutan pelaksanaan kebijakan.
- 2) *Context of implementation* (konteks pelaksanaan) perlu diperkuat dengan peningkatan dan penyesuaian strategi para pelaksana serta kepatuhan dan daya tanggap terhadap kebijakan pembebasan lahan yang bertujuan untuk mampu mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan, terutama dari sisi sosialisasi yang dilakukan secara kontinyu melalui pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat, serta dengan melaksanakan tahapan kegiatan yang membuka ruang terhadap keterlibatan

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

masyarakat. Selain dari itu kebijakan pembebasan lahan juga tidak berdiri sendiri dan harus disinergiskan dengan kelembagaan dan program lain yang mendukung untuk pemenuhan beberapa harapan masyarakat seperti untuk pemberdayaannya, peningkatan pendidikan dan pelatihan, perbaikan sarana dan prasarana umum.

- 3) Pemerintah, dalam hal ini pihak Panitia Pengadaan Tanah (P2T) agar lebih aktif dan berupaya secara optimal dalam sosialisasi secara kontinyu dengan pendekatan tersendiri dan dalam tahapan pelaksanaannya membuka ruang yang memungkinkan keterlibatan masyarakat secara penuh, sehingga dapat diperoleh masukan untuk memudahkan kesepakatan dan mufakat sesuai dengan keinginan masyarakat.
- 4) Pengendalian harga tanah yang ketat serta kerjasama antara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dengan Aparat Desa di dampingi oleh lembaga Independen dalam pengukuran tanah serta penilaian harga tanah dan bangunan/tanaman secara cermat dan terencana.
- 5) Sinergitas yang tinggi antar institusi serta bidang dan program pembangunan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan maupun untuk memenuhi harapan masyarakat, mengingat kebijakan pembebasan lahan tidaklah berdiri sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Dampak Sosial, Ekonomi Dan Politis Dalam pembangunan BIJB Kertajati dari sisi konten kebijakan masih membutuhkan beberapa perbaikan dan masukan, terutama sebagai akibat dari pelaksanaannya yang bertahap dan tidak sekaligus atau tidak sesuai dengan yang direncanakan akibat dari komitmen yang rendah dari semua pihak, serta belum terperhatikannya persepsi dan ekspektasi yang terjadi di masyarakat setempat. Sedangkan dari sisi konteks pelaksanaan, dipengaruhi juga oleh sejauhmana strategi yang dilaksanakan serta sinergitas lembaga dan program yang masih rendah dalam menyikapi permasalahan pembebasan lahan yang semakin kompleks.

Sehubungan dengan itu teori implementasi kebijakan dari Grindle (1980:10) dapat dipandang sesuai untuk digunakan dalam menjelaskan Dampak Sosial, Ekonomi Dan Politis

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Dalam pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati. Meskipun demikian hasil penelitian ini memperkuat teori dari Grindle, dengan beberapa temuan sebagai berikut: 1) Content of policy (konten kebijakan) terdapat beberapa penguatan yang perlu dilakukan, berkaitan dengan pentingnya penegasan komitmen semua pihak (kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi dan pelaksana program) sejak awal dalam merumuskan dan menyepakati sumber daya yang digunakan untuk menuntaskan dan memperlancar kebijakan pembebasan lahan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Selain itu penting juga diperhatikan persepsi dan ekpektasi masyarakat setempat dari kebijakan pembebasan lahan yang akan dilaksanakan (tipe manfaat dan derajat perubahan yang diinginkan) agar mendapat kesepahaman dan pada akhirnya penerimaan yang mendukung keberlanjutan pelaksanaan kebijakan. 2) Context of implementation (konteks pelaksanaan) perlu diperkuat dengan peningkatan dan penyesuaian strategi para pelaksana serta kepatuhan dan daya tanggap terhadap kebijakan pembebasan lahan yang bertujuan untuk mampu mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan, terutama dari sisi sosialisasi yang dilakukan secara kontinyu melalui pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat, serta dengan melaksanakan tahapan kegiatan yang membuka ruang terhadap keterlibatan masyarakat. Selain dari itu kebijakan pembebasan lahan juga tidak berdiri sendiri dan harus disinergiskan dengan kelembagaan dan program lain yang mendukung untuk pemenuhan beberapa harapan masyarakat seperti untuk pemberdayaannya, peningkatan pendidikan dan pelatihan, perbaikan sarana dan prasarana umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. CV.Alfabeta. Bandung Agustino, Leo.

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI-KP2W Lemlit Unpad
- Anderson, James E. 1978. Public Policy Making. Washington: Congressional Quarterly Press.Holt, Rinehart and Winston. Dunn, William N, 2000. Analisis Kebijakan Publik.Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Edwards III, G.C. 1980. Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Garna, Judistira K. 1999. Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif. Bandung: Primaco Akademika.
- Grindle, M.S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World. New Jersey: Princeton University Press.
- Budi Winarno. 2008. *Kebijakan Publik*, Pt. Buku Kita: Jakarta.
- Faizal, A., & Raharjo, S. (2021). *Persepsi Masyarakat Kota Bandung*. Seminar Nasional Dan Diseminasi Tugas Akhir, 282–288.
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 153 Tahun 2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara Baru Di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementrian Perhubungan Tahun 2010-2014
- Mulyono Yalia dari Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Bandung, Indonesia dengan judul **Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial** (Studi Pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat).
- Argo Baskoro Sasongko dan Sri Suwitri, dengan judul Implementasi Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Di Kecamatan Banyumanik Semarang pada jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
- Parmohonan Siregar dengan judul Pengaruh Implementasi Kebijakan Kependudukan Dan Kualitas Pelayanan Masyarakat Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Pembuatan

Received : 20 Jan 2025

Accepted : 20 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

KTP Elektronik Pada Kantor Catatan Sipil Bekasi Selatan.

Islamy, Irfan M. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Cetakan ke-15. Jakarta: Bumi Aksara.

Tangkilisan, Hesel. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta:YPAPI.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

Wibawa, Samudra, dkk. 1994. *Evaluasi Persada. Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Lindblom, Charles E. 1986. *Proses Penetapan Kebijaksanaan*. Cetakan Ke-2.Erlangga. Jakarta.

Masang, Roem topati, dkk. 2000. *Merubah Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.Yogyakarta.

MD, Mahfud. 2010. *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Jakarta Rajawali Pers.

Mardiasmo. 2002. *Ekonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta. Miles, B. Mathew dan Michael A. Huberman. 1992. *Anilisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjeptjep Rohendi Rohidi. UI Pers. Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Ke-17. Remaja Rosdakarya. Bandung Nasir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.